



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Press Release

Dili, 17 Februari 2007

**TUNTUTAN AKHIR JAKSA TERHADAP TERDAKWA ROGÉRIO TIAGO
LOBATO,Cs DALAM KASUS MEMPERSENJATAI MASYARAKAT SIPIL
DI TIMOR LESTE**

Sidang XIII dalam kasus pembagian senjata kepada masyarakat sipil di Timor Leste yang melibatkan terdakwa Rogério Tiago Lobato,Cs digelar dengan tujuan untuk mendengarkan tuntutan dari para Jaksa yang menangani kasus tersebut.

Seperti biasa sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Internasional Ivo Nelson de Caires Rosa Batista, Hakim Internasional Teresa do Rosário dan Hakim Nasional Antoninho Goncalves. Dari pihak Jaksa untuk kali ini dihadiri oleh dua orang Jaksa Internasional yakni Jaksa Internasional Bernardo C. Fernandes, dan Jaksa internasional Felismino Cardoso. JSMP mengamati bahwa pada sidang-sidang sebelumnya Jaksa Felismino Cardoso jarang hadir dalam sidang. Pihak Kejaksaan hanya mendelegasikan Jaksa Bernardo. Sedangkan dari pihak Pengacara seperti biasanya tetap dihadiri oleh Pengacara Paulo dos Remedios, Nelson de Carvalho, dan Luis serta Pengacara dari tersangka Marcos Piedade alias Labadain.

Sidang dalam mendengarkan tuntutan akhir Jaksa tersebut dimulai pada pukul 14:10 wtl. Setelah sidang dibuka secara resmi Hakim Ivo Nelson de Caires Rosa Batista langsung memberika waktu kepada para Jaksa untuk membacakan tuntutan mereka terhadap para terdakwa.

Jaksa Internasional dalam membacakan tuntutan terhadap para terdakwa terutama pada terdakwa Rogerio Tiago Lobato sangat bersikap tegas dan jelas dengan menyatakan bahwa anggapan terdakwa dalam menginterpretasi hukum dengan mengatakan bahwa ia sebagai Menteri Dalam Negeri yang membawahi PNTL dapat membagikan senjata kepada masyarakat sipil sama seperti yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak adalah suatu kesalahan besar yang tidak dapat ditolerir.

Sehingga Jaksa menuntut terdakwa Rogerio Tiago Lobato dengan tiga kejahatan besar yakni untuk kejahatan penyalahgunaan fasilitas Negara, memiliki dan

membagikan senjata secara ilegal, serta kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Untuk tersangka Francisco Salsinha dan Marcos Piedade alias Labadain, Jaksa menuntut dengan tuntutan kepemilikan senjata secara ilegal. Sedangkan untuk tersangka Francisco Xavier Viegas Jaksa tidak menuntut apa-apa karena Jaksa melihat bahwa tidak ada bukti satu pun yang diberikan oleh para saksi terhadap tersangka ini. Sehingga Jaksa meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan kemungkinan dalam membebaskan terdakwa tersebut.

Dalam tuntutan terhadap tersangka Rogério Tiago Lobato Jaksa pun menjelaskan secara detail pasal-pasal yang berkaitan dengan semua tuntutan terhadap diri tersangka seperti untuk kasus kejahatan penyalahgunaan fasilitas Negara. Untuk kasus ini dikenakan pasal 514 KUHP dengan referensi dari pasal 92. Untuk kasus kepemilikan senjata secara ilegal Jaksa menuntut dengan pasal 4 (4 & 7) Regulasi UNTAET 5/2001. Sedangkan untuk kasus pembunuhan dan perencanaan pembunuhan Jaksa menuntut dengan pasal 338 KUHP serta pasal 53.

Setelah pembacaan tuntutan oleh Jaksa, Hakim mempersilahkan para pembela tersangka untuk memberikan pembelaan terhadap klien mereka. Setelah berbicara panjang lebar, pembela Rogerio Tiago Lobato, Francisco Salsinha, Francisco Xavier Viegas memohon kepada Hakim agar memberikan pengampunan dan meminta untuk membebaskan mereka karena menurut pembela, mereka tidak bersalah. Untuk memperkuat pernyataannya itu, pembela berusaha membuat sebuah kliping yang terdiri dari artikel-artikel yang ditulis oleh pengamat politik Portugal untuk menunjukkan ada pihak ketiga dalam kerusuhan di Timor Leste. Tetapi Jaksa Bernardo menolak dengan tegas artikel-artikel tersebut dengan mengacu pada pasal 133 KPP karena Jaksa melihat itu semua hanya merupakan opini belaka dan tidak akan berpengaruh padauntutannya.

Sedangkan pihak Hakim menerima permohonan dari pembela tersebut untuk digunakan sebagai bukti dalam membantu menemukan kebenaran materiil dengan berdasarkan pada pasal 277 KPP yang mengacu pada kegunaan dari artikel atau opini tersebut.

Dari pihak pembela Marcos Piedade alias Labadain, Benevides C. Barros mengatakan bahwa pihaknya tidak melihat Labadain sebagai seorang pembunuh walaupun dia diminta untuk membunuh. Karena itu setelah mendengar himbuan dari pemerintah kepada masyarakat sipil untuk menyerahkan senjata yang dimiliki oleh mereka, Labadain dengan taat menyerahkan senjata pada pasukan Australia serta bersikap kooperatif. Ini semua menunjukkan bahwa seorang Labadain belum pernah terlihat suatu rekord Kriminal terhadap dirinya. Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir pada terdakwa maka Hakim diminta untuk memperhatikan semua fakta yang ada.

JSMP sangat menghargai keputusan para Jaksa dalam menuntut para terdakwa sehingga masyarakat kelak dapat melihat bahwa keadilan memang benar-benar telah muncul walaupun dalam perjalanannya selalu muncul berbagai macam anggapan terhadap keadilan itu sendiri bahwa keadilan itu tidak berfungsi atau tidak benar.

JSMP juga meminta kepada masyarakat untuk menghargai dan menghormati semua keputusan yang telah dan yang akan diputuskan pada putusan akhir mendatang karena dengan menghargai dan menghormati putusan yang akan diambil maka dengan sendirinya akan timbul keadilan di Timor Leste yang aman dan damai. JSMP juga meminta kepada semua masyarakat agar tidak menginterpretasikan hukum secara sepihak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang atau berbagai media massa yang memuat tentang hukuman Rogério Tiago Lobato akan mendapatkan hukuman maksimal sekitar 32 tahun adalah merupakan suatu interpretasi hukum yang menurut JSMP adalah salah besar. Sebab sebenarnya hukuman penjara tertinggi di Negara Timor Leste adalah *“maksimal 25 tahun penjara berdasarkan pasal 10(1^a) dari Regulasi UNTAET No.15/2000 tentang Tindak Kejahatan Berat yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara masih diterapkan di Timor Leste.”*

JSMP hanya mau mengingatkan bahwa inilah tuntutan akhir dari Jaksa dan Pembela. Pada hari Rabu, 7 Maret 2007 nanti baru kita dengar putusan akhir Pengadilan atas kasus mempersenjatai masyarakat sipil di Timor Leste yang melibatkan para terdakwa. Kita semua berharap dengan berdasarkan pada kebijakan dan suara hati yang dimiliki, Pengadilan dapat mengambil suatu keputusan pengadilan yang baik, adil, dan tanpa memihak dan suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:

Maria de Vasconcelos

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: vasconcelosmerry@yahoo.com